



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, ada tiga penelitian yang menjadi bahan referensi dan penelitian ini diambil dari berbagai universitas.

Penelitian yang pertama berjudul *Diskriminasi Gender Terhadap Buruh Perempuan Dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Di PT Star Cosmos Jakarta (2004)*. Penelitian ini dibuat oleh Mateus Priyo Wuryanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam metode ini, Mateus menitikberatkan pada analisis kasus, analisis hukum dan analisis gender yang terkait dengan diskriminasi terhadap buruh perempuan dalam jaminan kesehatan di PT Star Cosmos Jakarta.

Hasil penelitian yang ditemukan, jaminan kesehatan yang diterima hanyalah asuransi kecelakaan kerja dari Jamsostek, namun para buruh tidak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga yang ternyata ada dalam program Jamsostek. Para buruh tidak tahu mengenai jaminan ini. Fasilitas lain yang diberikan, yaitu tunjangan keluarga, hanya diberikan kepada buruh tetap laki-laki berdasarkan golongan jabatan. Jaminan kesehatan ini pun diberikan karena laki-laki adalah seorang kepala keluarga.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Fariyah Wachdin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang berjudul *Representasi Diskriminasi Perempuan Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk (Studi Semiologi Tentang Representasi Diskriminasi Perempuan Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari)* (2012).

Metode yang digunakan adalah metode analisis semiotika Roland Barthes, di mana dalam analisis ini menekankan kepada leksia-leksia yang dapat merepresentasikan diskriminasi perempuan dalam teks novel *Ronggeng Dukuh Paruk*. Fariyah memilah lima kode pembacaan dalam leksia yang ditentukan yaitu, kode hermeneutik, kode semik, kode simbolik, kode praretik, dan kode gnomik.

Dari penelitian tersebut, Fariyah menemukan makna representasi diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan dan pengucilan terhadap manusia. Ada 22 leksia yang merepresentasikan diskriminasi perempuan dalam novel *Ronggeng Dukuh Paruk*.

Penelitian yang ketiga yang dijadikan referensi adalah skripsi yang berjudul *Representasi Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Film Perempuan Berkalung Sorban* (2010) karya Rilly Yuniarda, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran.

Metode yang digunakan Rilly adalah metode semiotika Roland Barthes, di mana representasi diskriminasi perempuan dilihat melalui makna denotasi dan konotasi serta mitos yang ada di dalam film. Rilly mengambil empat adegan dalam film *Perempuan Berkalung Sorban* yang secara khusus merepresentasikan

diskriminasi terhadap perempuan. Rilly menganalisis dengan tanda-tanda berupa aspek visual (kode sinematik dan tata bahasa film) dan aspek tematis (dialog antar karakter).

Dari penelitian yang dilakukan Rilly, ada lima mitos yang teridentifikasi yaitu, mitos perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih, mitos perempuan tidak pantas bergerak di ruang publik, mitos perempuan dilarang menjadi pemimpin, mitos perempuan hanya berguna ketika sudah menikah, mitos perempuan hak milik pribadi keluarga dan mitos peran perempuan hanya terbatas pada ruang domestik.

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

Konteks	Mateus Priyo Wuryanto	Fariyah Wachdin	Rilly Yuniarda
Judul	<i>Diskriminasi Gender Terhadap Buruh Perempuan Dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Di PT Star Cosmos Jakarta</i>	<i>Representasi Diskriminasi Perempuan Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk (Studi Semiologi Tentang Representasi Diskriminasi Perempuan Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk</i>	<i>Representasi Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Film Perempuan Berkalung Sorban</i>

		<i>Karya Ahmad Tohari)</i>	
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi tentang diskriminasi gender terhadap buruh perempuan dalam tunjangan jaminan pemeliharaan kesehatan 2. Mengetahui pengetahuan buruh dan perusahaan mengenai diskriminasi gender di PT Cosmos 3. Memperoleh informasi faktor-faktor yang menjadi hambatannya 	Mengetahui bagaimana representasi diskriminasi perempuan dalam novel <i>Ronggeng Dukuh Paruk</i> karya Ahmad Tohari	Mengetahui bagaimana film <i>Perempuan Berkalung Sorban</i> merepresentasikan perempuan baik dilihat dari makna denotasi maupun konotasi, sekaligus mengetahui mitos perempuan yang terkandung dalam film <i>Perempuan Berkalung Sorban</i>
Metode	Analisis Yuridis Sosiologis	Semiotika Roland Barthes	Semiotika Roland Barthes

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Para buruh tidak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga dari Jamsostek dan tunjangan keluarga hanya diberikan kepada buruh tetap laki-laki sesuai dengan golongan jabatan</p>	<p>Makna representasi diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan dan pengucilan terhadap manusia. Ada 22 leksia yang merepresentasikan diskriminasi perempuan dalam novel <i>Ronggeng Dukuh Paruk</i></p>	<p>Ada lima mitos yang teridentifikasi yaitu, mitos perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih, mitos perempuan tidak pantas bergerak di ruang publik, mitos perempuan dilarang menjadi pemimpin, mitos perempuan hanya berguna sesudah menikah, mitos perempuan hak milik pribadi keluarga dan mitos peran perempuan hanya terbatas pada ruang domestik</p>
<p>Perbedaannya</p>	<p>Subjek penelitian peneliti adalah film <i>Minah Tetap Dipancang</i>. Selain itu, metode penelitian ini adalah semiotika Charles S. Pierce untuk melihat representasi</p>	<p>Subjek dan metode penelitiannya berbeda. Subjek penelitian ini adalah film <i>Minah Tetap Dipancang</i> dan metode penelitian yang digunakan</p>	<p>Subjek penelitian dan metode berbeda. Subjek penelitian peneliti adalah film <i>Minah Tetap Dipancang</i> dan metode yang digunakan adalah</p>

	diskriminasi perempuan dalam film yang direpresentasikan melalui seorang TKW (buruh migran)	adalah semiotika Charles S. Pierce	semiotika Charles S. Pierce
--	---	------------------------------------	-----------------------------

2.2 Konsep-Konsep Yang Digunakan

2.2.1 Representasi

Representasi adalah proses merekam ide, pengetahuan, pesan secara fisik. Hal ini bisa didefinisikan secara akurat sebagai kegunaan dari sebuah tanda (gambar, suara, dan sebagainya) untuk menghubungkan, menjelaskan, menggambarkan atau memproduksi kembali sesuatu yang dipersepsikan, dirasakan secara indera kita, diimajinasikan, dihayati dalam bentuk fisik (Danesi, 2002: 3). Lebih lanjut Danesi menjelaskan:

Representasi bisa dikarakterisasi sebagai sebuah proses dari mengkonstruksi sebuah "X" untuk menarik perhatian terhadap sesuatu yang ada baik secara materi ataupun secara konsep yaitu "Y" dengan cara yang spesifik, $X=Y$. Mengetahui makna $X=Y$ bukanlah sesuatu yang mudah. Ada maksud dari orang yang mengkonstruksi, sejarah dan konteks ketika tanda itu dibuat, tujuan dari dibuatnya tanda itu dan seterusnya, adalah sebuah faktor-faktor kompleks untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan (Danesi, 2002:3).

Representasi adalah memproduksi sebuah makna dari konsep yang ada di pikiran kita melalui bahasa. Representasi menjadi penghubung antara konsep

dengan bahasa yang membuat kita bisa mengasosiasikan entah dunia yang “nyata” mengenai benda, seseorang, kejadian atau sesuatu dari dunia imajinasi kita tentang benda, seseorang atau kejadian yang bersifat fiksi (Hall, 1997: 17).

Menurut Hall (1997: 17-18), ada dua sistem representasi. Pertama, sistem di mana kita menghubungkan berbagai macam objek, orang, kejadian dengan sebuah konsep atau yang disebut representasi mental yang ada di dalam kepala kita. Tanpa representasi mental, kita tidak akan bisa menginterpretasi dunia dengan makna secara mendalam. Semenjak awal, makna bergantung kepada sistem dan konsep yang kita bentuk dalam pikiran kita yang bisa diasosiasikan “merepresentasi” dunia, baik yang ada di dalam maupun di luar kepala kita.

Yang kedua adalah bahasa. Konsep-konsep yang ada di kepala kita harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai sehingga kita bisa menghubungkan konsep dan ide kita terhadap kata-kata yang tertulis, suara dari pengucapan maupun gambar visual. Istilah umum yang kita gunakan dalam kata-kata, suara atau gambar yang memiliki makna disebut dengan tanda. Tanda ini yang merepresentasikan konsep dan hubungan konsep antara mereka yang kita bawa dalam kepala kita dan bersama-sama mereka membuat sistem makna dari budaya kita.

Ada tiga pendekatan untuk menjelaskan bagaimana mengetahui makna representasi melalui bahasa. Ada pendekatan reflektif, pendekatan intensional dan pendekatan konstruktivis (Hall, 1997: 24-25).

Dalam pendekatan reflektif, makna dianggap berada dalam sebuah objek, seseorang, ide atau kejadian yang ada di dunia nyata dan bahasa bekerja layaknya

sebuah cermin, untuk merefleksikan makna sesungguhnya yang sudah ada di dunia. Perlu diingat, banyak kata, suara dan gambar yang ada. Hall menganalogikan dengan sebuah bunga mawar. Belum tentu “bunga mawar” di budaya lain adalah sebuah bunga yang memiliki duri . Sehingga untuk mengerti satu sama lain, salah satu dari kita harus mencari kode yang menghubungkan “bunga mawar” di budaya lain.

Dalam pendekatan intensional, makna harus sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pembuat tanda. Pemikiran kita harus dinegosiasikan dengan makna lain untuk kata-kata dan gambar yang sudah ada dalam bahasa sehingga kita langsung mengetahui makna yang dimaksud.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan konstruktivis. Dalam pendekatan ini, kita tidak perlu bingung dengan dunia *material*, di mana suatu benda atau orang ada dan praktik simbolik dan proses melalui representasi dan bahasa beroperasi. Bukan dunia *material* yang memberikan makna, namun sistem bahasa yang merepresentasikan konsep kita.

Fiske (1987: 5-6) menjelaskan mengenai kode representasi dalam tiga level yaitu realita, representasi dan ideologi.

Dalam level realita, tanda terlihat dari penampilan, pakaian, *make up*, lingkungan, perilaku, kata-kata, gerakan, ekspresi dan suara.

Dalam level representasi, tanda dilihat secara teknis. Mulai dari kamera, pencahayaan (*lighting*), *editing* (termasuk suara dan musik).

Dalam ideologi, sebuah tanda diorganisasikan dalam koherensi dengan kode ideologi. Ideologi tersebut bisa bermacam-macam. Misal, individualisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, kapitalisme, dan lain-lain.

Kode-kode representasi ini dapat diidentifikasi dan dianalisis. Seorang pengarah kamera menjadi bagian penting dalam pengambilan gambar yang spesifik, mulai dari pembingkai, fokus, jarak, pergerakan kamera, sudut pandang dan pemilihan lensa. Namun, pemaknaan kode-kode mengenai ideologi akan lebih sulit untuk ditemukan (Fiske, 1987: 6).

2.2.2 Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama dan sebagainya. (Fulthoni, dkk., 2009: 3).

Menurut Theodorson dan Theodorson dalam Fulthoni, dkk. (2009:3), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Menurut Fulthoni, dkk. (2009: 4), jenis diskriminasi yang sering terjadi antara lain:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin).
- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat.
- d. Diskriminasi para penderita HIV/AIDS.
- e. Diskriminasi karena kasta sosial.

Prasangka menghasilkan diskriminasi. Orang yang menjadi target prasangka akan berusaha untuk keluar dari kelompoknya ketika pekerjaan, tempat tinggal, hak politik, kesempatan pendidikan atau institusi sosial lainnya dipermasalahkan (Samovar, Porter dan McDaniel, 2010: 209). Sebuah prasangka makin diperparah dengan cap buruk (*stereotype/stigma*). Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga kemudian kita mengeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya. Diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas cap buruk dan prasangka itu sudah berubah menjadi aksi (Fulthoni, dkk., 2009: 5-6).

Komitmen menuju kesetaraan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari bagi seseorang untuk mendapatkan kebebasan dari dominasi di berbagai aspek penting dalam kehidupan. Seseorang mempunyai kontrol dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bukan berasal dari orang lain. Kebebasan yang dimaksud adalah

kebebasan tanpa ada intervensi dari orang lain dalam beberapa hal penting dalam kehidupan kita (Smith, 2011: 59).

Kesetaraan adalah sebuah nilai moral yang bisa diekspresikan dalam bentuk hukum dan ini menjadi sesuatu yang umum. Namun, dalam hukum mengenai diskriminasi, hal itu menjadi sesuatu yang bertahap. Hal ini karena kesetaraan dalam hukum biasanya memiliki bias terhadap kelompok, tipe seseorang secara umum, dalam pikiran (perempuan, homoseksual, orang cacat, seseorang dalam rasa tertentu, dan sebagainya) (Smith, 2011: 75).

Diskriminasi terhadap seseorang akibat ras atau jenis kelamin bisa dikatakan sebagai tindakan memperlakukan orang secara tidak setara. Kita secara kontras mengoposisikan diri kita dari masalah kesetaraan dan masalah penghormatan atas seseorang untuk mendapatkan kesejahteraannya (Smith, 2011: 77).

Diskriminasi bisa terlihat dari berbagai bentuk baik secara verbal, perilaku dan dalam berbagai situasi. Menurut Whitley dan Kite (2010: 13-18), diskriminasi terbagi dalam empat level:

1. Diskriminasi Interpersonal

Perlakuan tidak adil terjadi kepada individual atau individu terhadap individu lainnya yang bisa terjadi akibat stereotip yang diyakini, evaluasi dari kelompok atau keduanya yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang.

2. Diskriminasi Organisasi

Kebijakan atau peraturan yang dibuat dalam institusi kerja yang bersifat formal menyebabkan adanya diskriminasi. Walaupun organisasi bisa muncul dalam bermacam-macam bentuk, namun hal mengenai diskriminasi ras dan gender selalu muncul dalam dunia pekerjaan.

3. Diskriminasi Institusional

Norma, kebijakan, aturan terkait dalam institusi sosial, seperti keluarga, institusi agama, sistem edukasi dan sistem hukum yang berlaku menyebabkan adanya perbedaan terhadap seseorang. Diskriminasi institusional bisa memberikan sebuah keuntungan terhadap kelompok tertentu dengan membatasi pilihan mereka, hak mereka atau akses informasi maupun orang lain karena aksi yang dimaksud sebagai sebuah diskriminasi “disetujui” oleh institusi sosial tersebut.

4. Diskriminasi Kultural

Jones (1997) dalam Whitley dan Kite, menyatakan dalam budaya, kelompok yang memiliki kekuasaan untuk menentukan nilai-nilai budaya sebagaimana menentukan bagaimana sebuah nilai budaya seharusnya dijalankan. Kelompok yang berkuasa menciptakan dan menjalankan dominasi mereka dengan memberikan penghargaan bagi yang menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan mereka dan memberikan hukuman bagi nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai. Benokraitis dan Feagin (1995) dalam Whitley dan Kite, menyatakan diskriminasi dan ketidaksetaraan dibangun dalam literatur, seni, musik, bahasa, moral,

budaya, kepercayaan dan ideologi yang mereka sebut secara general pandangan yang benar dalam kehidupan.

Dalam diskriminasi kultural, kebijakan pemerintah bisa saja mendukung diskriminasi tersebut. Inilah mengapa baik diskriminasi institusional dan diskriminasi kultural sulit untuk dipahami dan terkadang sulit untuk diterima oleh orang lain terutama yang tidak memiliki hubungan dengan budaya tersebut. Untuk mengetahui apakah bentuk yang ada di dalam budaya tersebut adalah sebuah diskriminasi, seseorang harus “keluar” dari apa yang mereka percayai atau nilai-nilai yang dipegang (Whitley dan Kite, 2010: 18).

Benokraitis dan Feagin (1995: 39, 41, 42) dalam Whitley dan Kite (2010: 372-373) menjelaskan tiga bentuk diskriminasi yaitu:

1. Diskriminasi yang terlihat jelas (*Blatant Discrimination*).

Dalam diskriminasi ini, ketidaksetaraan dan perlakuan mengancam biasanya intensional dan mudah terlihat. Contoh, kasus pemukulan kepada seorang *gay* sampai tewas atau mengikuti orang berkulit hitam di jalan karena dianggap sering mencuri.

2. Diskriminasi yang tidak begitu terlihat jelas (*Subtle Discrimination*).

Dalam diskriminasi ini, ketidaksetaraan dan perlakuan mengancam tidak begitu terlihat seperti *blatant discrimination* karena dianggap sesuatu yang normal dan natural, sehingga sifatnya tidak intensional.

Contoh, seorang anak kulit hitam yang pintar tidak dianggap oleh gurunya di sekolah.

3. Diskriminasi yang tidak terlihat (*Covert Discrimination*).

Dalam diskriminasi ini, ketidaksetaraan dan perlakuan mengancam bersifat tersembunyi, memiliki tujuan tertentu dan biasanya dilakukan agar memastikan seseorang mengalami kegagalan.

Seseorang biasanya melakukan tindakan diskriminasi karena mereka biasanya bosan dan ingin mendapatkan kesenangan tertentu. Biasanya seseorang akan memilih target yang kemungkinan tidak bisa untuk melapor atau seseorang yang tidak memiliki kekuasaan untuk melawan kembali. Norma yang ada dalam kelompok justru bisa mendukung tindakan diskriminasi ini dan melihatnya sebagai sesuatu yang normal (Whitley dan Kite, 2010:414).

Diskriminasi dalam konteks budaya adalah sebuah konsep yang sulit. Berbicara mengenai diskriminasi dan budaya akan menjadi perdebatan yang panjang karena sifatnya yang kompleks. Smith menyatakan diskriminasi adalah hal yang sulit dibahas namun, budaya memiliki level lain. Dalam “diskriminasi” setidaknya kita masih bisa mengevaluasi dengan indera kita, namun “budaya” tidak. Dalam “budaya” ada begitu banyak makna dan tidak semuanya jelas dalam apa yang benar menurut budaya. Hal inilah yang bisa menjadi isu semantik untuk melawan argumen kita mengenai diskriminasi yang tentu saja berkaitan dengan argumen mengenai moral (Smith, 2011: 91).

2.2.3 Diskriminasi dan Perempuan

Diskriminasi atau perbedaan perlakuan sering terjadi terhadap perempuan karena ketidaksetaraan gender, masalah budaya dan status sosial atau ekonomi. Untuk lebih jelasnya, peneliti telah menjabarkannya dalam tiga sub bab.

2.2.3.1 Ketidaksetaraan Gender

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan biasa dipandang melalui stereotip gender. Gender sering diartikan sebagai jenis kelamin. Kedua istilah memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah seks terkait pada komponen biologis. Artinya, masing-masing jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) secara biologis berbeda dan sebagai perempuan dan laki-laki mempunyai keterbatasan dan kelebihan tertentu berdasarkan fakta biologis masing-masing (Ihromi, 2000: 4).

Sebaliknya, gender adalah hasil sosialisasi dan enkulturasi seorang atau gender adalah hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seorang yang ia pelajari. Yang dipelajari biasanya berbagai sifat dan perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Sifat-sifat seperti “feminitas” bagi perempuan dan “maskulinitas” bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya (Ihromi, 2000: 4-5).

Ternyata, hingga sekarang lebih banyak laki-laki yang mendominasi wilayah publik dianggap wajar-wajar saja. Sebaliknya, pembagian peran gender semacam tersebut telah menyebabkan berbagai masalah dan ketidakadilan bagi perempuan. Yang menjadi masalah adalah “ketidakadilan gender” ini tidak

dianggap aneh karena telah tersosialisasi dalam diri perempuan dan laki-laki, sehingga menjadi sulit untuk dipisahkan secara jelas apa yang “kodrat” dan apa yang merupakan hasil belajar (Ihromi, 2000: 5,7).

Bahkan apa yang dipelajari seringkali dianggap sebagai kodrati, dan terciptalah sebuah sistem ketidakadilan gender yang kemudian diterima secara meluas, dianggap sesuatu yang biasa, dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah (Ihromi, 2000:7).

Menurut Wharton (2005: 221), ketidaksetaraan gender terwujud dari dua proses yang saling berhubungan yaitu institusionalisasi dan legitimasi.

Institusionalisasi adalah proses di mana hubungan sosial menjadi bagian dari sebuah institusi. Kelompok dominan tidak hanya akan mencoba untuk mengakui adanya ketidaksetaraan, namun juga secara personal tidak merasa memiliki tanggung jawab ataupun merasa bersalah.

Legitimasi adalah proses di mana ketidaksetaraan gender menjadi sebuah “kebenaran”, maka dari itu, seseorang akan merasa apa yang dilakukannya adalah adil dan masuk akal. Ketidaksetaraan menjadi sesuatu yang diperbolehkan bahkan dapat ditolerir. Ketidaksetaraan ini bisa tidak terlihat atau tidak diketahui.

Dalam hubungan antara gender dan kekerasan, Eagly,dkk. (2004:245) menjelaskan kekerasan menjadi aspek signifikan dalam kekuatan yang sulit dilawan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan antara kelompok dominan dan tidak dominan. Schwendinger dan Schwendinger dalam Eagly,dkk. (2004:245) menyatakan ancaman kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan laki-laki kepada

perempuan telah dianalisis menjadi sumber yang besar akan ketidaksetaraan gender. Perlawanan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan pelecehan secara emosional tidak hanya merusak perempuan namun juga membatasi mereka untuk keluar dari perlakuan kasar secara domestik dalam suatu hubungan.

2.2.3.2 Budaya dan Diskriminasi

Dalam budaya Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, ada pandangan hukum yang menimbulkan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan ini dibangun dalam sistem pemerintahan dan struktur sosial, serta adanya interpretasi dalam Islam (Doumoto, 2010: 1).

Dalam sistem pengadilan perempuan memiliki kekurangan akses karena mereka harus bergantung kepada saudara laki-laki mereka atau seorang pengacara untuk menghadirkan mereka dalam ruang pengadilan. Hakim memberikan kesempatan kepada wanita untuk bisa hadir dalam pengadilan dengan syarat, penjaga mereka harus hadir untuk memverifikasikan identitas mereka dan memberikan izin untuk hadir dalam pengadilan. Identifikasi ini sangat diperlukan karena ketika berada dalam pengadilan, perempuan dilarang untuk memperlihatkan wajahnya dan hakim tidak menerima kartu identitas sebagai bukti dari identitas perempuan tersebut (Doumoto, 2010: 4).

Selain itu, Doumato (2010:5,7) menjelaskan ada sebuah aksi kriminal yang secara khusus menargetkan perempuan yaitu *khulwa*. *Khulwa* adalah pertemuan yang ilegal antara perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan dan bisa

terjadi ketika seorang perempuan dan laki-laki makan malam bersama, naik taksi, atau seorang perempuan dan laki-laki yang melakukan pertemuan bisnis.

Lebih lanjut, Doumoto menyatakan dalam masalah kepemimpinan dan religiusitas, perempuan dianggap tidak bisa menjadi pemimpin dalam sebuah institusi religius yang ada di Arab dan sangat disarankan untuk beribadah di rumah walaupun sebenarnya seperti yang telah dijelaskan dalam buku-buku di sekolah dan juga dalam standar manual Arab Saudi, beribadah lebih baik dilakukan di masjid.

Pembedaan perlakuan terhadap perempuan ini memang tidak lepas dari budaya patriarki yang ada dalam budaya Timur Tengah. Menurut Retnowulandari (2010: 17), patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak. Secara etimologi, patriarki berkaitan dengan sistem sosial di mana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya, serta sumber-sumber ekonomi. Ia juga yang membuat semua keputusan penting bagi keluarga. Dalam sistem sosial, budaya (juga keagamaan), patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan; bahwa perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.

Lebih lanjut, Retnowulandari menyatakan patriarki membudaya di segala sistem kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi dan hukum. Hal ini karena patriarki dikonstruksikan, dilembagakan dan disosialisasikan lewat institusi-institusi yang terlibat sehari-hari

dalam kehidupan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja sampai kebijakan negara.

Walby (1993) dalam Retnowulandari (2010: 17-18) membedakan patriarki menjadi dua, patriarki privat dan patriarki publik. Dalam patriarki privat, patriarki bermuara dalam wilayah rumah tangga. Wilayah rumah tangga ini menjadi daerah utama kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan, patriarki publik menempati wilayah-wilayah publik seperti lapangan pekerjaan dan negara. Inti dari teori ini adalah telah terjadi ekspansi wujud patriarki dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang lebih luas seperti negara.

Ekspansi wujud patriarki ini mengubah baik pemegang “struktur kekuasaan” dan kondisi di masing-masing wilayah, baik publik maupun privat. Dalam wilayah privat misalnya, dalam rumah tangga, yang memegang kekuasaan berada di tangan individu (laki-laki), tapi di wilayah publik, yang memegang kunci kekuasaan berada di tangan kolektif (manajemen negara dan masyarakat yang tentunya berada di tangan banyak orang laki-laki juga). Maka, tidak heran apabila produk-produk negara dan masyarakatnya sangat kental budaya patriarkinya (Retnowulandari, 2010: 18).

Menurut Foqahaa (2011: 235), dengan adanya sistem budaya patriarki, laki-laki memiliki kebebasan dalam memutuskan sesuatu dan bisa menundukkan perempuan secara langsung bahkan mempunyai kontrol penuh atas sosok perempuan.

Lebih lanjut, Fiqahaa (2011: 242) menjelaskan objektifikasi dari tubuh perempuan membuat perlakuan kekerasan fisik (pemukulan dan hukuman), kekerasan seksual (pemeriksaan, pelecehan), kekerasan psikologis (sindiran, komodifikasi perempuan dalam media) dan kekerasan sosial (perceraian dengan kekerasan dan poligami) menjadi sesuatu yang normal dan diperbolehkan (kekerasan yang bersifat normal).

Masalah budaya termasuk bahasa dan adaptasi terhadap kebiasaan adat-istiadat yang berbeda dapat menimbulkan berbagai salah paham dan salah pengertian yang juga dapat memicu tindakan-tindakan yang kurang manusiawi terhadap pekerja. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga yang notabene dilakukan oleh mayoritas perempuan sering kurang dihargai dan dianggap sepele (Sihite, 2007: 39).

Perlakuan terhadap pembantu rumah tangga ini juga tidak lepas dari adanya perbudakan yang pernah muncul di Arab Saudi. Perbudakan yang terjadi di Timur Tengah memang sudah ada sejak abad ke-19. Hopper (2008: 6-8) menyatakan orang-orang di Arab diasumsikan menginginkan budak karena mereka tidak suka bekerja keras dan dalam budaya mereka memperbolehkan mereka memiliki budak. Dalam memilih budak mereka, orang Arab lebih memilih perempuan dibandingkan laki-laki dan pemilihan budak ini menjadi salah satu cara untuk melakukan perluasan ekonomi global di abad ke-19.

Maka, pembantu rumah tangga yang bekerja di sektor ini adakalanya dianggap inferior karena pendidikannya rendah, tidak memiliki keterampilan

husus dan lebih diasosiasikan dengan peran melayani dan dianggap tidak bernilai (Sihite, 2007: 40).

2.2.3.3 Status Sosial dan Ekonomi

Menurut Sihite, perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri kerap mendapatkan diskriminasi. Berbagai tindak kekerasan dan penderitaan yang menimpa pekerja migran baik selama proses rekrutmen, pemberangkatan, maupun selama bekerja di luar negeri, telah banyak dilaporkan, baik melalui media massa, maupun lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional (Sihite, 2007: 37).

Lebih lanjut, Sihite menjelaskan akumulasi berbagai perlakuan salah terjadi di tataran hubungan kerja majikan dengan pekerja. Berbagai persoalan yang cukup memprihatinkan, yakni viktimisasi serius terhadap pekerja, terjadi berbagai tindak kekerasan/penyiksaan baik fisik, psikis, seksual maupun sosial yang menimbulkan traumatik, depresi bahkan ada yang sampai bunuh diri.

Para migran perempuan Indonesia yang bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga dapat dikategorikan pekerja terselubung. Artinya, aktivitas pekerja, bagaimana relasi sosial yang terjadi antara pekerja dengan majikan merupakan relasi yang tidak setara dan sulit dipantau serta tidak ada mekanisme khusus untuk mengontrol aktivitas pekerja rumah tangga karena terjadi pada tataran yang sangat privasi. Kondisi demikian akan rentan terhadap berbagai perlakuan/tindakan semena-mena. Kondisi kerja, jaminan sosial/perlakuan

terhadap pekerja domestik sangat tergantung dan sering ditentukan sepihak oleh majikan tanpa ada kontrol pihak lain (Sihite, 2007: 39).

Realitas di lapangan membuktikan bahwa pekerja migran perempuan Indonesia mengalami berbagai malapetaka dan viktimisasi bukan semata-mata karena identitas gendernya, tetapi status mereka sebagai migran/pendatang dengan kultur dan bangsa yang berbeda dengan masyarakat setempat, kelas, dan posisi sosial/ekonomi mereka juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan majikan mereka (Sihite, 2007: 41).

Pemberdayaan pekerja migran perempuan ini menjadi salah satu prioritas, tidak hanya memberikan keterampilan dalam pekerjaan tetapi menyosialisasi kondisi sosial budaya dan penguasaan bahasa negara yang dituju (Sihite, 2007: 44).

Dalam masalah pekerjaan, perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dibandingkan laki-laki karena perempuan kurang memiliki pengalaman dan keterampilan serta kurangnya kualifikasi akibat dari alokasi waktu perempuan yang sebelumnya ada di rumah. Perempuan kurang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pekerjaannya dibandingkan laki-laki akibat dari posisi mereka dalam keluarga. Perempuan bekerja di dalam rumah merawat anak (selain itu juga suami dan orang tua). Hal inilah yang membuat mereka tidak memiliki waktu untuk bekerja di luar dan menambah pengalaman mereka seperti yang dilakukan laki-laki (Walby, 1991: 29).

Dalam dunia kerja, pelecehan seksual terhadap perempuan juga terjadi. Nathalie H (dalam Sihite, 2007: 71) menyatakan karakteristik spesifik mengenai pelecehan seksual di tempat kerja. Karakteristiknya adalah:

1. Diulangi dan tidak diinginkan oleh pihak yang dilecehkan
2. Disengaja atau dilakukan tanpa disadari
3. Menimbulkan penghinaan, rasa tertekan, bahkan serangan
4. Mengganggu performa kerja atau menciptakan suasana kerja yang sangat tidak menyenangkan
5. Terdiri dari kata-kata atau tindakan yang dihubungkan dengan seksualitas seseorang

Penyelesaian kasus pelecehan seksual tidak sederhana sebagaimana terjadi di tempat umum, mengingat setiap individu terikat dengan aturan ketentuan kerja yang mesti dipatuhi. Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan refleksi dari relasi-relasi asimetris, baik posisi, status, dan kekuasaan antara perempuan sebagai bawahan dan laki-laki sebagai atasan (Sihite, 2007: 72,77).

Budaya patriarki memiliki hubungan dengan masalah seks dan kekerasan yang dilakukan laki-laki dalam pekerjaan. Pelecehan seksual dapat mengontrol perempuan dalam pekerjaan dan dapat mengeluarkan mereka dari pekerjaan mereka, jika pelecehan seksual ini memang dilakukan untuk membatasi perempuan untuk masuk ke dalam wilayah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki (Walby, 1991: 52).

2.2.4 Media dan Diskriminasi Perempuan

Keindahan perempuan dan kekaguman lelaki terhadap perempuan adalah cerita klasik dalam sejarah umat manusia. Dua hal itu pula menjadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Namun, ketika perempuan menjadi simbol dalam seni-seni komersial, maka kekaguman-kekaguman terhadap perempuan itu menjadi sangat diskriminatif, tendesius, dan bahkan menjadi subordinasi dari simbol-simbol kekuatan laki-laki (Bungin, 2006: 350).

Kehadiran perempuan dalam kelas sosial, masih menjadi bagian dari refleksi realitas sosial masyarakatnya, bahwa perempuan selalu menjadi subordinat kebudayaan laki-laki. Karenanya, tetap saja perempuan di media massa adalah “perempuannya lelaki” dalam realitas sosialnya. Namun, dalam konteks perempuan, perempuan terkadang tampil dalam bentuk yang lebih keras dan keluar dari stereotip perempuan sebagai sosok lembut dan tak berdaya. Perempuan juga sering tampil sebagai perayu, penindas dan bahkan pecundang. Sosok perempuan ini banyak ditemukan dalam iklan media, sekaligus merupakan rekonstruksi terhadap dunia realitas perempuan itu sendiri (Bungin, 2006: 351).

Lebih khusus dalam iklan, Bungin (2006: 352-353) menyatakan apa yang dilakukan oleh perempuan hanyalah untuk menyenangkan orang lain, terutama laki-laki, sedangkan ia sendiri adalah bagian dari upaya menyenangkan bukan yang menikmati rasa senangnya, perempuan hanya senang kalau orang lain merasa senang, dan tanpa sadar kalau ia merasa senang dirinya dieksploitasi.

Lebih lanjut, Bungin menjelaskan perempuan juga digambarkan dalam iklan sebagai kelompok pinggiran. Umumnya kehadiran perempuan dalam banyak iklan hanya sebagai pelengkap dan sumber legitimasi terhadap realitas yang diungkapkan.

Tidak hanya dalam iklan saja, Bungin (2006: 353-354) juga menyatakan pemberitaan perempuan dalam media massa juga tidak seimbang. Ketika pemberitaan media massa menyangkut persoalan-persoalan laki-laki, maka media massa menyorotinya sebagai “pahlawan-pahlawan” publik yang menjadi pahlawan karena masyarakat membutuhkan mereka. Namun, persoalan menjadi serius ketika pemberitaan media massa menyangkut sisi-sisi “aurat perempuan”, makna pemberitaannya justru menjadi konsumsi laki-laki, sehingga terkesan perempuan dieksploitasi sebagai sikap ketidakadilan terhadap perempuan dan bahkan kekerasan terhadap mereka.

2.2.5 Semiotika

Istilah semiotika berasal dari kata *semeion*, yang dalam bahasa Yunani sebagai “penunjuk” atau “tanda” fisik untuk membahas apa yang direpresentasikan oleh gejala, bagaimana ia mengejawantah secara fisik, dan mengapa ia mengindikasikan penyakit atau kondisi tertentu merupakan esensi dari dunia medis. Sekarang, walaupun tujuan semiotika hari ini adalah untuk menelusuri sesuatu yang cukup berbeda, ia tetap mempertahankan metode dasar penelaah yang sama (Danesi, 2012: 6).

Umberto Eco seperti yang dikutip Chandler (2002: 2) mendefinisikan semiotika adalah segala sesuatu yang bisa dilihat sebagai tanda. Semiotika meliputi studi yang tidak hanya menyebut sesuatu sebagai tanda dalam keseharian, tetapi juga segala sesuatu yang “berdiri” untuk sesuatu yang lain. Dalam semiotika, tanda terwujud dalam kata-kata, gambar, suara, gerakan badan dan objek.

Fiske (2011: 60) menjelaskan tiga bidang studi utama semiotika:

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya.
2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau untuk mengeksplorasi saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya.
3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri.

Dua model dominan kontemporer yang membahas mengenai tanda adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce (Chandler, 2002: 13). Gagasan-

gagasan mereka selain membentuk kerangka dasar untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi tanda, juga menerapkan semiotik pada studi sistem pengetahuan dan budaya (Danesi, 2012: 29).

Saussure menggambarkan tanda sebagai struktur biner, yaitu struktur yang terdiri dari dua bagian: (1) bagian fisik, yang disebutnya sebagai *penanda*, dan (2) bagian konseptual, yang disebut sebagai *petanda*. Saussure menganggap tautan antara penanda dan petanda, bersifat manasuka dan terbangun setelah beberapa lama untuk suatu tujuan sosial tertentu (Danesi, 2012: 30).

Dengan demikian, de Saussure dan para pengikutnya melihat tanda sebagai sesuatu yang menstruktur (proses pemaknaan berupa kaitan antara penanda dan petanda) dan terstruktur (hasil proses tersebut) di dalam kognisi manusia (Hoed, 2007: 3).

Namun, minat utama Saussure adalah sistem linguistik, minat keduanya adalah cara sistem berelasi dengan realitas yang diacunya dan yang paling sulit dari semua itu adalah cara sistem berelasi dengan pembaca dan posisi sosio-kulturalnya. Dengan kata lain, dia tak sungguh-sungguh memperhitungkan makna sebagai proses negosiasi antara pembaca/penulis dan teks. Dia menekankan pada teks, bukan cara tanda-tanda di dalam teks berinteraksi dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, tidak juga tertarik pada cara konvensi di dalam teks berinteraksi dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya (Fiske, 2011: 117).

Lain halnya dengan Charles Sanders Peirce. Peirce menyebut tanda sebagai *representamen* dan konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang diacunya sebagai *objek*. Makna (impresi, kognisi, perasaan dan seterusnya) yang kita peroleh dari sebuah tanda oleh Peirce diberi istilah *interpretan*. Tiga dimensi ini selalu hadir dalam signifikasi. Oleh karena itu, Peirce memandang sebagai sebuah struktur triadik, bukan biner (Danesi, 2012: 32).

Namun ada seorang pengikut Saussure yang pertama kali menyusun model sistematis untuk menganalisis negosiasi dan gagasan makna interaktif yaitu Roland Barthes. Inti teori Barthes adalah gagasan tentang dua *tatanan pertandaan* (Fiske, 2011: 118).

Fiske menjelaskan dalam teori Barthes, tatanan pertandaan pertama adalah landasan kerja Saussure. Tatanan ini menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda dan antara tanda dengan referennya dalam realitas eksternal. Barthes menyebut tatanan ini sebagai denotasi. Hal ini mengacu pada anggapan umum, makna jelaslah tentang tanda.

Lebih lanjut, Fiske menyatakan untuk menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua, digunakan istilah konotasi dalam teori Barthes. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunaannya dan nilai-nilai kulturalnya. Ini terjadi tatkala makna bergerak menuju subjektif atau setidaknya intersubjektif.

Kalau konotasi sudah menguasai masyarakat, akan menjadi mitos. Barthes mencoba menguraikan betapa kejadian keseharian dalam kebudayaan kita menjadi

seperti “wajar”, padahal itu mitos belaka akibat konotasi yang menjadi mantap di masyarakat (Hoed, 2007: 4-5).

Jadi, lepas dari apakah paham semiotik struktural atau pragmatis yang kita anut, semiotik dapat digunakan untuk mengkaji kebudayaan. Gejala budaya dilihat oleh semiotik sebagai suatu sistem tanda yang berkaitan satu sama lain dengan cara memahami makna yang ada di dalamnya. Keterkaitan itu bersifat konvensional (Hoed, 2007: 4).

Penelitian semiotik pada pokoknya cenderung menggunakan dimensi metodologi dengan paradigma kualitatif, metode yang meenggolongkan data atas data auditif, tekstual dan audiovisual. Dalam kebanyakan kajian semiotik, data yang dijadikan objek analisis pada umumnya *teks*, baik sebagai perwakilan pengalaman maupun sebagai objek kajian. Namun, tidak sedikit semiotik mengkaji data auditif dan audiovisual. Bahkan, ada kecenderungan pula bahwa ketiga golongan data itu dianggap teks yang terbagi menjadi teks auditif (verbal dan non verbal), audiovisual (verbal dan nonverbal), visual (nonverbal) dan tertulis (verbal) (Hoed, 2007:7).

Kita belajar dari semiotika bahwa kita hidup di dalam dunia penuh dengan tanda dan kita tidak mempunyai cara lain untuk mengerti mengenai apapun kecuali melewati tanda dan kode yang telah dibuat. Hidup dalam dunia yang penuh dengan tanda-tanda visual, kita perlu mempelajari bahkan tanda yang serealistis mungkin belum tentu “tanda” itu sendiri (Chandler, 2002: 11).

2.2.6 Film

Film adalah media yang masih muda jika dibandingkan media lainnya. Namun, sebagai pendatang baru, film telah menyatakan dirinya sebagai bentuk media seni yang memiliki kekuatan (Bordwell, 2008: 1).

Mudjiono (2011) menyatakan film memiliki nilai seni tersendiri, karena film tercipta sebagai sebuah karya dari tenaga-tenaga kreatif yang profesional di bidangnya. Lebih lanjut, Mudjiono juga menyatakan film bukan hanya menyajikan pengalaman yang mengasyikkan, melainkan juga pengalaman hidup sehari-hari yang dikemas secara menarik.

Film mengkomunikasikan ide dan informasi dan film memperlihatkan tempat dan sisi kehidupan lain yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Film menawarkan kita sebuah sudut pandang dan emosi akan sesuatu yang kita rasakan begitu menyenangkan. Film membawa kita berdasarkan pengalaman dan pengalaman itu dibentuk lewat cerita dan karakter, tetapi film juga bisa mengembangkan ide dengan kualitas visual atau tekstur dari suara. Film membawa kita kepada sebuah perjalanan, menawarkan pengalaman yang memainkan pikiran dan emosi kita (Bordwell, 2008: 1,4).

Lebih lanjut, Bordwell menjelaskan semua yang ada di dalam film terpengaruh dari sebuah konteks. Terkadang kita mengambil sebuah momen untuk dipelajari dari film tersebut, namun untuk mendapatkan makna sesungguhnya dari sebuah film, kita harus melihat sebuah film secara keseluruhan, dari awal hingga akhir.

Selain film komersial, film independen pun juga menjadi salah satu film yang dibuat. Namun, pembuat film independen harus membiayai proyek mereka sendiri atau dengan bantuan kerabat mereka, mereka pun harus mencari distributor khusus independen dan film dengan biaya produksi murah. Tetapi, karena film independen tidak memerlukan audiens untuk membayar biaya produksi mereka, film independen ini bisa bersifat personal ataupun kontroversial (Bordwell, 2008: 28).

Beberapa penonton film memiliki ekspektasi untuk mempelajari sesuatu dari sebuah film. Mereka bisa menyukai sebuah film karena ada pesan relevan yang ingin disampaikan. Dalam pembuatan film ada makna implisit dan eksplisit yang ingin disampaikan. Abstrak dari makna implisit akan membahas mengenai konteks yang lebih besar yang disebut dengan tema. Dalam menginterpretasi sebuah film, kita harus berusaha keras agar kita bisa melihat garis besar dari film tersebut. Dalam sebuah film, makna implisit dan eksplisit sangat bergantung kepada relasi antara narasi dan gaya film tersebut (Bordwell, 2008: 62).

Menurut Villarejo (2007: 29-52), ada delapan komponen penting dalam sebuah pembentukan *mise-en-scene* atau film:

1. Latar (*Setting*)

Dalam pembuatan latar ada yang dibuat oleh manusia agar terlihat realistik adapun juga lokasi yang bisa dijadikan tempat latar. Biasanya dalam latar, properti

juga menjadi hal yang penting untuk membangun *mood* dalam film.

2. Pencahayaan (*Lighting*)

Seperti halnya properti, *lighting* membangun mood dan membuat perhatian kepada sesuatu yang bersifat lebih mendetail.

3. Kostum dan Rambut

Sebuah kostum dan tatanan rambut dapat memperlihatkan *genre* dari sebuah film dan membuatnya lebih detail.

4. *Make Up*

Make Up membuat karakter lebih hidup dan mempertahankan karakter itu sendiri.

5. Akting (*Figure Behavior*)

Tindakan, ekspresi, sikap atau aksi yang dilakukan oleh aktor menjadi “bahasa” untuk menyampaikan isi cerita dari film.

6. *Cinematography*

Untuk menyampaikan kisah dari film harus melewati sebuah medium yaitu kamera. Dalam komponen *cinematography*, sudut pandang yang diambil kamera, jarak pandang kamera, gerakan kamera menjadi sangat penting.

7. *Editing*

Dalam *editing*, sebuah adegan yang diambil di tempat-tempat berbeda, namun bisa dijadikan sebuah jalan cerita yang menjadi satu dan akhirnya bisa dilihat oleh para audiens.

8. *Sound*

Dengan adanya *sound* sebuah adegan menjadi lebih hidup dan kita bisa mencoba menginterpretasi suara tersebut dalam sebuah bayangan visual, sehingga kita bisa mengekspektasi sebuah adegan dari *sound* yang dikeluarkan oleh film tersebut.

2.2.7 Semiotika Film

Film adalah cara komunikasi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan komunikasi tersebut tidak akan efektif kecuali kita memperhitungkan bagaimana penyampaian pesan tersebut dapat diterima oleh penonton. Jika sebuah film ingin memberikan efek tertentu, pembuat film harus mengetahui bagaimana sebuah layar bisa menyampaikan efek tersebut. Mereka harus mengetahui bagaimana gambar visual yang muncul dapat dimengerti oleh audiens dan dapat membentuk sebuah imajinasi di setiap momennya. Hal inilah yang membuat semiotika berguna (Edgar-Hunt, Marland dan Rawle, 2010: 18).

Oey Hong Lee (1965 dalam Sobur, 2013: 126) menyebutkan, film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai masa pertumbuhannya pada abad ke-19, dengan perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin lenyap.

Ini berarti, menurut Sobur, dari permulaan sejarahnya, film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-19.

Namun, seiring dengan kebangkitan film, muncul pula film-film yang mengumbar seks, kriminal dan kekerasan. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai studi komunikasi massa (Sobur, 2013: 126-127).

Kemudian, Sobur menyatakan kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli menyatakan film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Sejak itu, maka merebaklah berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat.

Seperti dikemukakan oleh van Zoest dalam Sobur (2013: 128), film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian gambar dalam film menciptakan imaji dan sistem penandaan. Karena itu, menurut Van Zoest, bersamaan dengan tanda-

tanda arsitektur, terutama indeksial, pada film terutama digunakan tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu.

Lebih lanjut, van Zoest menyatakan bahwa film menuturkan ceritanya dengan cara khususnya sendiri. Kekhususan film adalah mediumnya, cara pembuatannya dengan kamera dan pertunjukannya dengan proyektor dan layar (Sobur, 2013: 130).

Film sebetulnya juga tidak jauh beda dari televisi. Namun, seperti yang disampaikan Sardar dan Loon dalam Sobur (2013: 130-131), film dan televisi memiliki bahasanya sendiri dengan sintaksis dan tata bahasa yang berbeda. Tata bahasa itu terdiri dari atas semacam unsur yang akrab, seperti pemotongan (*cut*), pemotretan jarak dekat (*close up*), pemotretan jarak jauh (*long shot*), pembesaran gambar (*zoom in*), pengecilan gambar (*zoom out*), memudar (*fade*), pelarutan (*dissolve*), gerakan lambat (*slow motion*), gerakan yang dipercepat (*speeded up*), efek khusus (*special effect*).

Lebih lanjut, Sardar dan Loon menyatakan bahasa tersebut juga mencakup kode-kode representasi yang lebih halus yang tercakup dalam kompleksitas dari penggambaran visual yang harfiah hingga simbol-simbol yang paling abstrak dan arbitrer serta metafora. Metafora visual sering menyinggung objek-objek dan simbol-simbol dunia nyata serta mengonotasikan makna-makna sosial dan budaya.

Ketika kita membicarakan film, biasanya kita hanya melihat karakter, aksi dan dialog. Namun, sebenarnya hal-hal tersebut dibuat dari unit-unit yang lebih kecil. Misal, sebuah karakter dibuat dari informasi-informasi kecil (seperti bentuk

tubuh, gerakan tubuh dan kata-kata yang disampaikan) yang telah dipilih untuk membentuk sebuah karakter (Edgar-Hunt, Marland dan Rawle, 2010: 18). Sebuah film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol visual dan linguistik untuk mengodekan pesan yang sedang disampaikan (Sobur, 2013: 131).

2.3. Kerangka Pemikiran

